

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penerimaan dari sektor pajak memegang peranan yang sangat penting untuk kelangsungan sistem Pemerintahan suatu negara, karena penerimaan terbesar suatu negara adalah bersumber dari pajak. Oleh karena itu, pajak perlu dikelola secara seksama dengan meningkatkan peran serta seluruh lapisan masyarakat dan dari aparat perpajakan sendiri.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta masyarakat khususnya wajib pajak yang secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Dalam liputan kegiatan workshop perpajakan oleh Ambar Setiawan dikemukakan bahwa sebesar 70% lebih penerimaan negara Republik Indonesia bersumber dari pajak, baik pajak pusat maupun pajak daerah. Oleh karena itu pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak terus berusaha menggenjot dan menaikkan target penerimaan pajak dari tahun ke tahun. Realisasi penerimaan pajak dalam kurun waktu 5 tahun menunjukkan hal yang mengembirakan. Tahun 2005 terjadi pertumbuhan penerimaan 21,90%, tahun 2006 19,56%, tahun 2007

21,39%, tahun 2008 29,27%, tahun 2009 4,38% dan tahun 2010 19,2%. Senada dengan tingkat pertumbuhan penerimaan pajak tersebut, jumlah wajib pajak yang terdaftar juga terus mengalami peningkatan hingga tahun 2010, jumlah kepemilikan telah mencapai 16 juta NPWP (Berita Pajak, 15 Januari 2010 dan 13 Januari 2011 dalam Kompas.com dan *Investor Daily*).

Realisasi penerimaan pajak oleh Kanwil Direktorat Jendral Pajak (DJP) DIY pada semester I/2011 mencapai Rp853 miliar atau 40% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp2,15 triliun. Pencapaian ini dikemukakan oleh Kepala Pelayanan, Penyuluhan dan Humas Kanwil DJP DIY, Johnny M Panjaitan lebih baik jika dibandingkan tahun lalu (bisnis-jateng.com : 21 Juli 2011). Meskipun tahun-tahun terakhir ini terdapat peningkatan yang sangat baik, kesadaran dan kepedulian masyarakat Indonesia terhadap pajak masih sangat kurang, sebagian besar masyarakat masih awam tentang pajak, baik cara melaksanakan kewajiban perpajakan dan yang tidak kalah pentingnya adalah kurangnya pengetahuan tentang manfaat dan kegunaan pajak bagi kehidupan berbangsa dan bernegara (Berita Pajak, 28 February 2011 oleh Ambar Setiawan).

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menaikkan penerimaan pajak adalah melalui reformasi peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan (*tax reform*) yang mencakup usaha penyempurnaan sistem dan mekanisme perpajakan dari yang sebelumnya sudah ada. Termasuk di dalamnya, perubahan paling mendasar dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. Beralihnya sistem perpajakan dari *official assessment system* menjadi *self assessment system* ini bukanlah karena salah satu di antara kedua

sistem tersebut lebih baik, melainkan karena adanya upaya dari pemerintah untuk menyesuaikan sistem perpajakan dengan sistem perekonomian dan perkembangan dalam masyarakat. Selain itu reformasi perpajakan ditujukan untuk meningkatkan penerimaan negara untuk kesejahteraan rakyat dan penerimaan daerah untuk meningkatkan pelaksanaan otonomi daerah.

Keuntungan *self assessment system* ini adalah wajib pajak diberi kepercayaan oleh pemerintah (*fiskus*) untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Kelemahan *self assessment system* yang memberikan kepercayaan pada wajib pajak untuk menghitung, menyetorkan dan melaporkan sendiri pajak terutang, dalam praktiknya sulit berjalan sesuai dengan yang diharapkan atau bahkan disalahgunakan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya wajib pajak yang dengan sengaja tidak patuh, kesadaran wajib pajak yang masih rendah atau kombinasi keduanya, sehingga membuat wajib pajak enggan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Untuk memudahkan pelaksanaan *self assessment system*, diperlukan peran serta *fiskus* dalam melakukan pembinaan yang dilakukan melalui penyuluhan pengetahuan perpajakan, pelayanan, dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Penyuluhan pengetahuan perpajakan dilakukan baik melalui media massa maupun penerangan langsung kepada masyarakat. Pelayanan dilakukan dengan penyediaan fasilitas-fasilitas yang memadai agar dapat menciptakan kenyamanan dan kemudahan bagi wajib pajak. Fungsi

pengawasan dilakukan untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Wajib pajak pada umumnya merasa terbebani dengan adanya pajak, karena pajak akan meningkatkan biaya atau mengurangi pendapatan. Di samping itu, masyarakat juga menganggap bahwa pajak hanya menguntungkan satu pihak saja dalam hal ini yaitu pihak pemerintah sebagai penerima pajak, padahal penarikan pajak sebenarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia karena pajak yang diterima oleh pemerintah tersebut akan dikembalikan untuk kepentingan masyarakat dalam berbagai bentuk seperti pemberian dan perbaikan fasilitas, serta penambahan pelayanan publik bagi masyarakat, sehingga persepsi tersebut menyebabkan masyarakat kurang memiliki kesadaran membayar pajak. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka dilakukan usaha penyuluhan dan sosialisasi mengenai perpajakan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pajak dari pihak Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak). Penyuluhan perpajakan merupakan suatu sistem penyampaian informasi dan bimbingan perpajakan agar masyarakat tergugah dan sadar untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga dapat meningkatkan pengetahuan perpajakan masyarakat secara positif.

Penelitian ini mengangkat isu tentang pelaksanaan *self assessment system* dan kewajiban perpajakan khususnya pada wajib pajak orang pribadi di wilayah kota Yogyakarta. Hal ini menarik karena fenomena yang berkembang di masyarakat menunjukkan bahwa wajib pajak sudah membayar pajak, tetapi masih timbul kebingungan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Padahal *self assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang

memberi kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Selain itu, faktor penting dari pelaksanaan *self assessment system* adalah kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Salah satu faktor yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya adalah tingkat pendidikan. Dalam penelitian ini, penulis membedakan persepsi wajib pajak orang pribadi lulusan SMA dengan lulusan S1 karena pola pemikiran antara wajib pajak lulusan SMA dengan S1 tentu berbeda, sehingga hal ini dapat mempengaruhi kesadaran mereka dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan fenomena tersebut, maka peneliti mencoba melakukan analisis dengan menggunakan data kualitatif dan mendiskripsikan pada wajib pajak orang pribadi di wilayah kota Yogyakarta. Peneliti ingin melihat bagaimana persepsi wajib pajak orang pribadi di kota Yogyakarta terhadap pelaksanaan *self assessment system* dan bagaimana persepsi wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan ditinjau dari tingkat pendidikannya.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana persepsi Wajib pajak Orang Pribadi terhadap pelaksanaan fungsi-fungsi Wajib pajak dan pelaksanaan fungsi-fungsi *fiskus* dalam pelaksanaan *self assessment system* ?

- 2) Apakah terdapat perbedaan persepsi Wajib pajak Orang Pribadi terhadap pelaksanaan fungsi-fungsi Wajib pajak dan pelaksanaan fungsi-fungsi *fiskus* dalam pelaksanaan *self assessment system* ?
- 3) Apakah terdapat perbedaan persepsi yang signifikan di antara Wajib pajak Orang Pribadi terhadap kewajiban perpajakan ditinjau dari tingkat pendidikan ?

1.3. Batasan Masalah

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis membatasi pembahasan masalah pada beberapa hal sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan *self assessment system* pada wajib pajak orang pribadi di wilayah kota Yogyakarta yang mempunyai usaha sendiri atau melakukan pekerjaan bebas.
- 2) Wajib pajak orang pribadi yang memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib pajak).
- 3) Jenis pajak yang diteliti adalah Pajak Penghasilan Orang Pribadi.
- 4) Variabel-variabel yang dipakai dalam penelitian ini adalah fungsi-fungsi wajib pajak yang terdiri dari fungsi penghitungan, fungsi pembayaran, dan fungsi pelaporan serta fungsi-fungsi *fiskus* yang terdiri dari fungsi penyuluhan, pelayanan dan pengawasan dalam pelaksanaan *self assessment system*.

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan utama dalam penelitian ini yaitu :

- 1) Untuk mengetahui persepsi wajib pajak orang pribadi di kota Yogyakarta dalam menjalankan fungsi-fungsinya yaitu, penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak yang terhutang pada pelaksanaan *self assessment system*.
- 2) Untuk mengetahui persepsi wajib pajak orang pribadi di kota Yogyakarta mengenai kepatuhan *fiskus* dalam menjalankan fungsi-fungsinya yaitu penyuluhan, pelayanan dan pengawasan pada pelaksanaan *self assessment system*.
- 3) Untuk mengetahui persepsi wajib pajak orang pribadi di kota Yogyakarta terhadap kewajiban perpajakan khususnya mengenai peranan pajak dan kewajiban membayar pajak ditinjau dari tingkat pendidikannya.

1.5. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk :

- 1) Pemerintah (*fiskus*), sebagai koreksi atas pelaksanaan *self assessment system* sehingga diharapkan sistem administrasi perpajakan yang efisien benar-benar terwujud serta membantu pemerintah dalam menilai bagaimana tingkat kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya saat ini. Dengan demikian pemerintah dapat lebih meningkatkan kegiatan penyuluhan atau sosialisasi.
- 2) Peneliti lain, sebagai referensi untuk penelitian yang serupa dengan topik yang sama dan menambah kepustakaan terutama di bidang perpajakan.

- 3) Wajib pajak, sebagai bukti ilmiah untuk menilai pelaksanaan *self assessment system* serta mengetahui sejauh mana pengetahuan mereka tentang perpajakan secara benar.

1.6. Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey yaitu penelitian yang diadakan untuk memperoleh fakta-fakta tentang gejala-gejala atas permasalahan yang timbul. Kajiannya yang menjadi ciri-ciri metode survey tidak perlu mendalam, tidak perlu menyelidiki kenapa gejala-gejala tersebut ada serta menganalisis hubungan-hubungan atas gejala-gejala (Umar, 2003:33 dalam Dewi, 2006: 8).

1.6.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta (kota). DIY dipilih karena merupakan tempat tinggal sementara peneliti, sehingga peneliti bisa menghemat waktu, tenaga, biaya dan dapat dengan mudah memperoleh data-data yang akurat.

1.6.2. Populasi dan Sampel

Populasi (*population*) mengacu pada keseluruhan kelompok orang, kejadian, atau hal minat yang ingin peneliti investigasi (Sekaran, 2006:121). Populasi berkenaan dengan data, bukan dengan orangnya ataupun bendanya. Jadi yang dimaksud dengan populasi adalah keseluruhan subjek atau unit penelitian

yang akan dianalisis. Dalam penelitian ini populasi penelitiannya adalah seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi yang berada di kota Yogyakarta.

Sampel (*sample*) adalah bagian dari populasi. Sampel terdiri atas sejumlah anggota yang dipilih dari populasi. Jadi, sampel adalah subkelompok atau sebagian dari sampel (Sekaran, 2006:123).

Teknik pengambilan sampel adalah dengan menggunakan *purposive sampling*, dimana sampel yang digunakan dalam penelitian ini dipilih berdasarkan kriteria-kriteria sebagai berikut :

- 1) Masyarakat kota Yogyakarta yang memiliki usaha sendiri atau melakukan pekerjaan bebas.
- 2) Masyarakat kota Yogyakarta yang telah memiliki NPWP dan akan atau sedang melakukan kewajiban perpajakan.

1.6.3. Metode Pengumpulan Data

1.6.3.1. Data Primer

Dalam penelitian ini data primer dikumpulkan melalui kuisisioner. Kuisisioner/angket adalah daftar pertanyaan yang diberikan kepada orang lain yang bersedia memberikan respon sesuai dengan permintaan pengguna (Arikunto, 2005: 103 dalam Dewi, 2006:11). Dengan demikian angket/kuisisioner adalah daftar pertanyaan yang disiapkan oleh peneliti dimana setiap pertanyaan berkaitan dengan masalah penelitian.

1.6.3.2. Data Sekunder

Data Sekunder diperoleh dari sumber-sumber lain melalui buku atau literatur yang berhubungan dengan obyek penelitian.

1.6.4. Definisi Operasional Variabel

Data yang akan dikumpulkan melalui kuisisioner terbagi menjadi 3 bagian yaitu :

1) Bagian 1

Dalam bagian ini berisi data responden, yaitu nama usaha, jenis usaha, memiliki NPWP atau belum, dan jenjang pendidikan.

2) Bagian 2

Dalam bagian ini berisi pernyataan-pernyataan mengenai fungsi-fungsi wajib pajak dan fungsi-fungsi *fiskus* yaitu:

1) Fungsi Penghitungan

Fungsi penghitungan merupakan fungsi pertama bagi wajib pajak untuk menentukan berapa besarnya pajak yang terhutang. Untuk melaksanakan fungsi ini wajib pajak harus :

- Memahami peraturan perpajakan yang berlaku.
- Mengetahui setiap kali ada perubahan peraturan perpajakan.
- Menghitung sendiri besarnya pajak yang terhutang baik itu dilakukan sendiri ataupun menggunakan jasa pihak lain yang memiliki pengetahuan di bidang perpajakan.

2) Fungsi Pembayaran

- Wajib pajak memahami bahwa setelah menghitung besarnya pajak

yang terhutang, wajib pajak wajib membayar pajak tersebut dengan menyetorkannya ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan sampai batas waktu yang telah ditetapkan.

- Wajib pajak mengetahui bahwa pajak tersebut disetor atau dibayar dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak (SSP).

3) Fungsi Pelaporan

- Wajib pajak mengetahui bahwa setelah menghitung dan membayar pajaknya, wajib pajak wajib melaporkan pembayaran dan berapa besar pajak yang telah dibayar ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui Bank sesuai dengann batas waktu yang telah ditetapkan.
- Wajib pajak mengetahui bahwa dalam melapor pajaknya, wajib pajak wajib menggunakan formulir Surat Pemberitahuan (SPT) dan dapat juga melauai e-SPT atau elektronik SPT yang dapat diakses melalui internet.

4) Fungsi Penyuluhan

- *Fiskus* rutin mengadakan penyuluhan untuk memberikan informasi mengenai perpajakan kepada wajib pajak.
- Wajib pajak berpendapat bahwa kegiatan penyuluhan ini bermanfaat bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

5) Fungsi Pelayanan

- *Fiskus* selalu memberikan pelayanan dengan memberikan fasilitas-fasilitas yang memadai kepada wajib pajak.

- Wajib pajak berpendapat bahwa pelayanan yang selama ini diberikan dapat mendukung wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga wajib pajak merasa puas.

6) Fungsi Pengawasan

- Wajib pajak berpendapat bahwa dengan adanya peran *fiskus* dalam mengawasi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, wajib pajak dapat melaksanakannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

3) Bagian 3

Dalam bagian ini berisi pernyataan-pernyataan mengenai kewajiban perpajakan khususnya mengenai kewajiban membayar pajak dan manfaat dari membayar pajak.

1.6.5. Metode Pengukuran Data

Pengukuran data untuk jawaban dari responden menggunakan teknik pengukuran interval dengan skala likert, yaitu skala yang berisi lima tingkat jawaban mengenai kesetujuan responden terhadap *statement* atau pernyataan yang dikemukakan dalam kuisisioner tersebut. Data yang dihasilkan dari kuisisioner diukur dengan menggunakan Skala Likert yang terdiri dari lima kategori penilaian yaitu :

- 1) Sangat Tidak Setuju (STS) = diberi skor 1
- 2) Tidak Setuju (TS) = diberi skor 2
- 3) Netral (N) = diberi skor 3

- 4) Setuju (S) = diberi skor 4
5) Sangat Setuju (SS) = diberi skor 5

1.6.6. Metode Pengujian Alat Ukur

Untuk mengetahui validitas dan reliabilitas alat ukur dalam penelitian ini, penulis menggunakan alat bantu komputer dengan program SPSS versi 19.0, dengan pertimbangan akan diperoleh hasil perhitungan yang lebih teliti dan terhindar dari *human error*.

1.6.6.1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk menguji apakah daftar angket/kuesioner yang dibuat berdasarkan indikator-indikator yang ada dalam setiap variabel penelitian, baik itu untuk variabel bebas ataupun untuk variabel terikat, sah (valid) dan andal (reliabel) bila digunakan sebagai alat pengumpul data penelitian.

1.6.6.2. Uji Realibilitas

Realibilitas alat ukur menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran dengan menggunakan alat ukur tersebut dapat dipercaya. Hal ini ditunjukkan oleh taraf konsistensi skor yang diperoleh yang diukur dengan alat ukur yang sama atau diukur dengan alat yang sama pada kondisi yang berbeda.

1.6.7. Metode Analisis Data

Menurut Arikunto (1998), data adalah hasil catatan peneliti baik yang berupa fakta maupun angka. Kemudian Suharsimi Arikunto menjelaskan bahwa :

“Terdapat data kualitatif yaitu data yang dijabarkan dengan kata-kata menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan, sedangkan untuk data kuantitatif yang berwujud angka-angka hasil pengukuran atau perhitungan dapat diproses dengan cara : (1) dijumlahkan, dibandingkan dengan jumlah yang diharapkan dan diperoleh prosentase, (2) dijumlahkan, diklasifikasikan sehingga merupakan susunan urut data (*array*), dibuat tabel dan diproses lebih lanjut untuk pengambilan keputusan”.

Sesuai dengan pendapat di atas, maka data yang diperoleh dari penelitian ini adalah data kuantitatif, maka teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan persentase dan interval.

1.6.7.1. Analisis Persentase

Analisis ini bertujuan untuk menganalisis data yang diperoleh dari responden dengan cara menghitung prosentase jawaban yang ada (Sugiyono, 2004:43). Analisis ini juga digunakan untuk melihat karakteristik atau profil dari responden. Dengan cara ini dapat diketahui kelompok mana yang paling banyak jumlahnya yaitu ditunjukkan oleh prosentase yang tertinggi, dan demikian sebaliknya (Verawaty , 2007 : 36).

$$P = \frac{\sum Xi}{ni} \times 100\% \quad (1)$$

dimana :

P = Hasil Prosentase

$\sum Xi$ = Jumlah Variabel X

ni = Jumlah total responden

1.6.7.2. Uji Nilai Rata-Rata (Arithmetic Mean)

Analisis ini digunakan untuk mengetahui besarnya persepsi wajib pajak

orang pribadi terhadap pelaksanaan fungsi-fungsi wajib pajak dan pelaksanaan fungsi-fungsi fiskus dalam pelaksanaan *self assessment system*. Dari hasil rata-rata hitung, maka tingkat penilaian wajib pajak orang pribadi terhadap pelaksanaan *self assessment system* terlebih dahulu akan dilakukan pengkategorian berdasarkan kategori sangat tidak baik, tidak baik, netral, baik dan sangat baik, yaitu dengan membagi ke dalam lima interval kelas dengan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Interval} &= \frac{\text{Skor tertinggi} - \text{Skor terendah}}{\text{Banyaknya alternatif jawaban}} & (2) \\ &= \frac{5-1}{5} = \frac{4}{5} = 0,8 \end{aligned}$$

Setelah diketahui jarak intervalnya maka kategori dapat ditentukan sebagai berikut :

- 1) 1,00 – 1,80 = Sangat Tidak Baik
- 2) 1,81 – 2,60 = Tidak Baik
- 3) 2,61 – 3,40 = Netral
- 4) 3,41 – 4,20 = Baik
- 5) 4,21 – 5,00 = Sangat Baik

1.6.7.3. Analisis Independent Sample T-Test

Analisis ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan persepsi antara Wajib pajak Orang Pribadi Yogyakarta terhadap kewajiban perpajakan khususnya mengenai peranan pajak dan kewajiban membayar pajak ditinjau dari segi tingkat pendidikan antara S1 dan SMA.

$$t - \text{test} = \frac{X^1 - X^2}{\sqrt{\left[\frac{SD^2_1}{N_1 - 1} \right] + \left[\frac{SD^2_2}{N_2 - 1} \right]}} & (3)$$

Dimana :

X^1 = mean pada distribusi sampel 1

X^2 = mean pada distribusi sampel 2

SD^2_1 = nilai varian pada distribusi sampel 1

SD^2_2 = nilai varian pada distribusi sampel 2

N_1 = jumlah individu sampel 1

N_2 = jumlah individu sampel 2

1.6.7.4. Uji Persepsi Wajib Pajak

Analisis ini menggunakan analisis *One Sample T-Test*, yaitu pengujian satu sampel yang pada prinsipnya menguji apakah suatu nilai tertentu (sebagai pembanding, misalnya 3,00) berbeda secara nyata atau tidak dengan rata-rata sebuah sampel. Analisis data dengan metode *One Sampel T-Test* dilakukan dengan bantuan program SPSS 19.0. Penentuan hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternative (H_a) merupakan langkah pertama dalam pengujian hipotesis. Hipotesis yang diajukan dalam analisis penelitian ini adalah :

H_0 : menyatakan persepsi wajib pajak orang pribadi di kota Yogyakarta terhadap pelaksanaan fungsi-fungsi Wajib pajak dan pelaksanaan fungsi-fungsi *fiskus* dalam pelaksanaan *self assessment system* adalah tidak baik.

H_a : menyatakan persepsi wajib pajak orang pribadi di kota Yogyakarta terhadap pelaksanaan fungsi-fungsi Wajib pajak dan pelaksanaan fungsi-fungsi *fiskus* dalam pelaksanaan *self assessment system* adalah baik.

Nilai uji yang digunakan adalah 3,41 karena berdasarkan pengkategorian dengan interval 0,8 seperti yang telah dijelaskan di atas, nilai 3,41 merupakan batas nilai minimum kategori baik.

1.6.7.5. Perhitungan Proporsi dan Persentase

Tujuan analisis ini adalah untuk melihat apakah terdapat perbedaan persepsi wajib pajak orang pribadi terhadap pelaksanaan fungsi-fungsi wajib pajak dan fungsi-fungsi *fiskus* dalam pelaksanaan *self assessment system* di kota Yogyakarta. Menurut Verawaty (2007), tujuan analisis ini adalah untuk melihat seberapa besar proporsi atau prosentase yang dihasilkan dari jawaban-jawaban yang diperoleh dari responden. Rumusnya adalah sebagai berikut :

$$P = \frac{X_1}{n} \quad (4)$$

Dimana :

P = proporsi

X = banyaknya elemen jawaban

N = jumlah seluruh sampel

1.7. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan alasan penulis melakukan penelitian. Pendahuluan ini mencakup uraian tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini merupakan uraian teoritis yang digunakan sebagai dasar untuk mendukung penelitian ini yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang dirumuskan. Bab ini mencakup pengertian pajak, fungsi pajak, asas-asas pemungutan pajak, teori-teori pemungutan pajak, tata cara pemungutan pajak, sistem pemungutan pajak, pajak penghasilan, pengertian wajib pajak dan kewajiban serta persepsi.

BAB III PROFIL KPP PRATAMA YOGYAKARTA

Bab ini menguraikan tentang profil dari KPP Pratama Yogyakarta.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan hasil observasi lapangan mencakup data-data dan informasi yang dibutuhkan, dibahas juga tentang analisis dari data yang diperoleh dengan menggunakan metode analisis data yang ditentukan berdasarkan teori.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.